

***THE GIG ECONOMY AND REMOTE WORK IN JAYAPURA CITY:  
IMPLICATIONS FOR WORKER WELFARE AND LABOR POLICY***

**EKONOMI GIG DAN KERJA JARAK JAUH DI KOTA JAYAPURA:  
IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KEBIJAKAN  
KETENAGAKERJAAN**

**Alfani Laura Harikedua**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Cenderawasih  
[alfaniharikedua@feb.uncen.ac.id](mailto:alfaniharikedua@feb.uncen.ac.id)

**ABSTRACT**

*The development of digital technology has led to the emergence of the gig economy and remote work as new forms of employment, including in the city of Jayapura. This study aims to analyze the impact of the gig economy and remote work on worker welfare and its implications for local labor policies. This research employs a critical review approach using secondary sources such as academic journals, policy reports, and statistical data. The findings reveal that while work flexibility has increased, most workers face challenges such as income uncertainty, lack of social protection, and irregular workloads. These findings emphasize the need for adjustments to labor regulations that can accommodate the new dynamics of the digital workplace to ensure equitable well-being and protection for all workers.*

**Keywords:** *Gig Economy, Remote Work, Worker Well-Being, Labor Policy*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya ekonomi gig dan kerja jarak jauh sebagai bentuk baru dalam dunia kerja, termasuk di Kota Jayapura. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi gig dan kerja jarak jauh terhadap kesejahteraan pekerja serta implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan critical review terhadap sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fleksibilitas kerja meningkat, sebagian besar pekerja menghadapi tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan beban kerja yang tidak teratur. Temuan ini menekankan perlunya penyesuaian regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi dinamika baru dalam dunia kerja digital guna menjamin kesejahteraan dan perlindungan yang setara bagi seluruh pekerja.

**Kata Kunci :** *Ekonomi Gig, Kerja Jarak Jauh, Kesejahteraan Pekerja, Kebijakan Ketenagakerjaan*

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi dan proses digitalisasi telah mengubah secara signifikan struktur serta dinamika pasar tenaga kerja global, termasuk di Indonesia. Dua perubahan utama yang mencerminkan pergeseran ini adalah munculnya kerja jarak jauh (remote work) dan ekonomi gig. Kedua bentuk pekerjaan ini menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas bagi pekerja dan efisiensi operasional bagi perusahaan. Namun demikian, keduanya juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait perlindungan tenaga kerja, kestabilan pendapatan, dan kesiapan regulasi yang mendukung (De Stefano, 2016; ILO, 2021).

Sejumlah studi baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa kerja jarak jauh dan ekonomi gig berpotensi membuka akses kerja bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas (Katz & Krueger, 2019; Rahmatutik & Laksmono, 2023). Meski begitu, kedua model kerja ini juga memperbesar ketidakpastian pekerjaan, memperlemah daya tawar pekerja, serta mengaburkan batas hubungan kerja formal (Friedman, 2014; Yudhistira & Nasution, 2021). Situasi ini menuntut adanya reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap perubahan lanskap kerja digital (Tambunan, 2022).

Relevansi isu ini semakin meningkat ketika diterapkan dalam konteks Kota Jayapura, sebuah wilayah yang memiliki potensi digital namun masih menghadapi hambatan dalam infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Menurut data dari BPS Papua (2024), lebih dari 80% angkatan kerja di wilayah ini berada dalam sektor informal, yang biasanya ditandai oleh produktivitas rendah, penghasilan minim, serta minimnya jaminan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi gig dapat menjadi alternatif penghasilan, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pekerjaan formal. Akan tetapi, tanpa kebijakan yang memadai dan perlindungan yang kuat, potensi tersebut justru berisiko memperbesar kerentanan sosial dan ekonomi (Setyowati, 2021).

Penerapan kerja jarak jauh di Jayapura juga menemui tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya pemahaman teknologi di masyarakat, dan minimnya regulasi untuk melindungi pekerja non-tradisional (Kominfo, 2022; Bappenas, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan saat ini dapat menyesuaikan dengan realitas baru ini, serta bagaimana kebijakan tersebut bisa diadaptasi dalam konteks daerah yang memiliki karakter geografis dan sosial ekonomi khusus seperti Jayapura.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis literatur terkait pengaruh kerja jarak jauh dan ekonomi gig terhadap kesejahteraan pekerja, serta menilai relevansinya di Kota Jayapura. Melalui pendekatan *critical review* terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan data statistik, studi ini berusaha mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan regulasi yang ada. Dari temuan tersebut, akan disusun

rekomendasi berbasis bukti guna mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif di tingkat lokal.

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam ranah akademik maupun praktis, untuk mendukung pengembangan strategi ketenagakerjaan digital di Jayapura. Dengan landasan kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual, Kota Jayapura berpeluang mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus memanfaatkan transformasi digital sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam menghadapi perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat perkembangan kerja jarak jauh dan ekonomi gig, penting untuk meninjau kembali temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya yang telah membahas dampak kedua model kerja ini terhadap kesejahteraan tenaga kerja di berbagai wilayah. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk melihat sejauh mana pengalaman dari konteks lain dapat diterapkan di Kota Jayapura.

Selanjutnya, perlu dianalisis berbagai hambatan struktural dan kebijakan yang telah diidentifikasi dalam literatur, terutama dalam kaitannya dengan penerapan kerja jarak jauh dan ekonomi gig di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, seperti halnya Kota Jayapura. Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang khas menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengadopsi model kerja digital ini.

Akhirnya, penting untuk mengkaji bentuk-bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang telah dirumuskan atau diterapkan di berbagai tempat menurut studi terdahulu, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dimodifikasi dan disesuaikan untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja dalam konteks lokal Kota Jayapura.

## **Literatur Review**

### **Konsep Kerja Jarak Jauh**

Kerja jarak jauh merujuk pada suatu sistem pengaturan kerja yang memungkinkan seseorang menyelesaikan tugas-tugasnya dari lokasi di luar kantor dengan bantuan teknologi informasi. Menurut Baruch (2000), konsep ini memberikan fleksibilitas dalam hal tempat dan waktu kerja, yang dapat berdampak positif pada tingkat kepuasan kerja dan produktivitas. Sementara itu, studi eksperimental oleh Bloom et al. (2015) menunjukkan bahwa model kerja ini mampu meningkatkan efisiensi, meskipun berpotensi menimbulkan rasa keterasingan sosial dan kesulitan dalam pengawasan langsung.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2021) membagi kerja jarak jauh menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) sepenuhnya jarak jauh (fully remote), di mana pekerja tidak pernah hadir secara fisik di kantor; (2) hibrida (hybrid), yang menggabungkan kerja dari rumah dan kantor; serta (3) kerja jarak jauh berbasis platform digital, yang umum dijumpai dalam konteks ekonomi gig. De Stefano (2016) menekankan bahwa efektivitas kerja jarak jauh sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur digital yang memadai serta kebijakan perlindungan tenaga kerja yang jelas.

### **Konsep Ekonomi Gig**

Ekonomi gig merupakan model kerja yang didasarkan pada sistem kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas, yang umumnya dimediasi oleh platform digital. Friedman (2014) menyebut model ini sebagai bentuk "korporasi bayangan", karena mencairkan batas antara hubungan kerja

formal dan informal. Katz dan Krueger (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi gig terjadi sangat pesat karena memberikan peluang kerja yang fleksibel, terutama bagi kelompok yang sulit mengakses pekerjaan formal. Di Indonesia, ekonomi gig berkembang seiring dengan transformasi digital dan peningkatan penggunaan aplikasi teknologi berbasis layanan. Penelitian oleh Setyowati (2021) menunjukkan bahwa pekerja dalam sektor ini kerap kali tidak memiliki jaminan sosial serta menghadapi ketidakpastian pendapatan. Senada dengan itu, Yudhistira dan Nasution (2021) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang menjamin hak-hak pekerja gig.

Tambunan (2022) menambahkan bahwa ekonomi gig bisa menjadi solusi sementara di wilayah tertinggal seperti Papua, namun memerlukan dukungan kebijakan yang inklusif agar tidak memperdalam ketimpangan sosial.

### **Dinamika Pasar Tenaga Kerja di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital secara drastis telah mengubah pola permintaan tenaga kerja di tingkat global. Autor et al. (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, tetapi juga menggantikan peran pekerjaan yang bersifat rutin. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menggambarkan kondisi ini sebagai "pemisahan" (decoupling) antara pertumbuhan produktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Di Indonesia, laporan Bappenas (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi sektor industri telah meningkatkan efisiensi, namun juga memperbesar kesenjangan keterampilan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Dalam konteks daerah,

khususnya Papua, Kominfo (2022) melaporkan bahwa indeks literasi digital masih tergolong rendah dan infrastruktur telekomunikasi belum merata, yang kemudian berdampak pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan berbasis digital.

### **Kajian Penelitian Terdahulu**

Studi dari Rahmatutik dan Laksmono (2023) menekankan pentingnya kebijakan pasar tenaga kerja aktif (Active Labour Market Policy) melalui penguatan sistem informasi pasar kerja, pelatihan vokasional, dan layanan penempatan kerja berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini memberikan kerangka dasar untuk memahami bagaimana intervensi kebijakan dapat membantu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja informal maupun digital. Namun, hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik membahas implikasi kerja jarak jauh dan ekonomi gig di kawasan timur Indonesia, terutama Papua.

### **Kerangka Teoretis**

Penelitian ini mengacu pada teori dualisme pasar tenaga kerja yang dikembangkan oleh Doeringer dan Piore, yang membagi pasar kerja menjadi sektor formal dan informal. Dalam konteks ini, kerja jarak jauh dan ekonomi gig sering kali beroperasi di antara kedua sektor tersebut. Selain itu, pendekatan *Decent Work Agenda* dari ILO (2021) juga digunakan sebagai landasan analitis, yang menekankan pentingnya pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang aman dalam merespons perubahan pola kerja akibat digitalisasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *critical review* terhadap literatur yang relevan untuk menelaah secara mendalam dinamika kerja jarak jauh dan ekonomi gig, serta dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kota Jayapura. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah pengetahuan dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang sesuai dengan kondisi lokal.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari beragam sumber terpercaya, yang mencakup:

1. Artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2015 hingga 2024, membahas isu kerja jarak jauh, ekonomi gig, dan kesejahteraan pekerja.
2. Dokumen kebijakan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dan Kominfo.
3. Data statistik ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya yang berkaitan dengan kondisi di Kota Jayapura.
4. Laporan analitis dan kebijakan dari lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Bank Dunia.

### **Kriteria Seleksi Literatur**

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu:

1. Kesesuaian topik dengan fokus penelitian, khususnya yang membahas ekonomi gig, kerja jarak jauh, kesejahteraan tenaga kerja, serta kebijakan ketenagakerjaan.

2. Diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2024 guna memastikan relevansi dan aktualitas informasi.
3. Memiliki kredibilitas akademik atau berasal dari institusi resmi dan terverifikasi.
4. Memuat data empiris, analisis kebijakan, atau kerangka teoretis yang relevan dan dapat disesuaikan dengan konteks Jayapura.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui metode *desk research*, yang meliputi:

1. Penelusuran literatur melalui basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan Science Direct.
2. Pencarian dokumen kebijakan serta laporan resmi dari lembaga pemerintah.
3. Pengumpulan data sekunder dan statistik dari situs resmi lembaga terkait seperti BPS, Kominfo, dan ILO.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode sintesis tematik yang dipadukan dengan evaluasi kritis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

- **Klasifikasi Tematik:**  
Mengelompokkan literatur berdasarkan tema seperti dampak kerja jarak jauh, karakteristik ekonomi gig, dan persoalan kebijakan.
- **Analisis Kritis:**  
Mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan dari masing-masing sumber.
- **Perbandingan Kontekstual:**  
Menilai keterkaitan temuan dengan situasi spesifik di Jayapura, terutama terkait infrastruktur digital, kondisi tenaga kerja, dan kebijakan lokal.
- **Identifikasi Kesenjangan:**

Mengungkap perbedaan antara kondisi lokal dengan kebijakan yang tersedia.

- **Formulasi Rekomendasi:**

Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis sintesis literatur untuk mendukung pembangunan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif dan inklusif di era digital.

### **Keterbatasan Penelitian**

Sebagai studi yang sepenuhnya bergantung pada sumber sekunder, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan data primer dari lapangan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap konteks lokal Kota Jayapura sangat ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data sekunder. Untuk penelitian lanjutan, disarankan dilakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung dengan pelaku kerja gig dan pekerja jarak jauh di Jayapura guna memperkuat validitas dan kedalaman analisis.

### **Pembahasan dan Analisis**

Bab ini memaparkan hasil analisis yang mencakup tinjauan literatur, data statistik sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta studi kasus yang berfokus pada Kota Jayapura. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) sejauh mana kerja jarak jauh dan ekonomi gig memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja, (2) tantangan struktural apa saja yang muncul dalam implementasinya, dan (3) bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dapat disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.

### **Dampak Kerja Jarak Jauh dan Ekonomi Gig terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja**

Model kerja jarak jauh dan ekonomi gig menawarkan sejumlah keuntungan, seperti fleksibilitas waktu dan tempat, akses terhadap sumber penghasilan baru, serta peluang kerja bagi kelompok rentan (ILO, 2021; Katz & Krueger, 2019). Meskipun demikian, beberapa penelitian menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk ketidakstabilan pendapatan, rendahnya perlindungan sosial, serta beban kerja yang tidak terukur dan fluktuatif (Friedman, 2014; Yudhistira & Nasution, 2021).

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS Provinsi

**Tabel 1. Perbandingan Data Tenaga Kerja Kota Jayapura (Sumber: Sakernas BPS, 2024)**

Indikator Ketenagakerjaan	Kota Jayapura	Nasional (Indonesia)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,3%	68,1%
Persentase Pekerja di Sektor Formal	16,4%	39,0%
Persentase Pekerja di Sektor Informal	83,6%	61,0%
Akses ke Pelatihan Kerja (12 bulan terakhir)	8,6%	19,7%
Akses Internet Rumah Tangga	58,3%	78,2%
Pekerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	21,0%	52,6%
Rata-rata Jam Kerja per Minggu (informal)	34,1 jam	36,8 jam

Namun demikian, menurut data Sakernas, rata-rata jam kerja mingguan para pekerja di sektor informal di Jayapura hanya sekitar 34 jam, dengan penghasilan rata-rata yang masih di bawah upah minimum provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ekonomi gig bisa menjadi sumber pendapatan tambahan, tanpa adanya dukungan sistemik yang memadai, manfaatnya terhadap kesejahteraan jangka panjang pekerja masih terbatas. Selain itu, pekerja yang terlibat dalam platform digital umumnya belum memperoleh akses terhadap jaminan kecelakaan kerja maupun pensiun,

Papua tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Jayapura mencapai 70,3%. Namun, hanya sekitar 16,4% di antaranya yang bekerja di sektor formal, sedangkan mayoritas berada di sektor informal yang umumnya tidak dilengkapi dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Tingginya dominasi sektor informal ini menjadikan model kerja jarak jauh dan ekonomi gig relevan untuk dipertimbangkan sebagai opsi alternatif, khususnya bagi generasi muda yang mengalami kesulitan mengakses pekerjaan formal.

kecuali jika mereka mengurusnya secara mandiri.

### **Tantangan Struktural dan Kebijakan dalam Penerapan Kerja Digital di Jayapura**

Analisis literatur dan data BPS mengungkapkan tiga tantangan utama:

#### **1. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses Digital**

Walaupun Jayapura merupakan pusat administratif Provinsi Papua, hanya sekitar 58,3% rumah tangga yang memiliki akses internet berkualitas (BPS Papua, 2023). Beberapa distrik seperti Muara Tami dan Heram masih mengalami keterbatasan sinyal dan

infrastruktur dasar, sehingga penerapan kerja jarak jauh dan ekonomi gig menjadi tidak merata. Studi Kominfo (2022) juga menunjukkan bahwa indeks literasi digital di Papua termasuk yang terendah di wilayah Indonesia bagian timur.

2. Minimnya Pelatihan Keterampilan Digital

Sakernas melaporkan bahwa hanya 8,6% angkatan kerja di Jayapura yang telah mengikuti pelatihan vokasional atau peningkatan keterampilan kerja. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi gig yang menuntut keterampilan teknis seperti pengoperasian aplikasi, manajemen waktu, dan pemasaran digital.

3. Ketiadaan Kebijakan Perlindungan bagi Pekerja Gig dan Kerja Jarak Jauh Baik di tingkat nasional maupun daerah, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan sosial bagi pekerja digital yang bekerja secara non-formal. Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia masih berfokus pada klasifikasi pekerja formal dan informal konvensional, sehingga belum mengakomodasi pekerja berbasis platform atau kontrak proyek.

**Relevansi dan Adaptabilitas Kebijakan Ketenagakerjaan**

Literatur menekankan bahwa kebijakan pasar tenaga kerja aktif (Active Labour Market Policies ALMP) sangat penting untuk membantu pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan struktural di dunia kerja (Rahmatutik & Laksmono, 2023). Namun, penerapan kebijakan ini di wilayah timur Indonesia, termasuk Jayapura, masih kurang optimal. Evaluasi Sakernas 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar

program pelatihan di Papua lebih banyak difokuskan pada sektor pertanian dan kerajinan, sementara keterampilan digital yang diperlukan dalam ekonomi gig dan kerja jarak jauh masih belum mendapat perhatian.

Untuk mengembangkan ekonomi gig dan kerja jarak jauh secara efektif di Jayapura, perlu adanya integrasi kebijakan antar sektor, seperti penguatan infrastruktur digital oleh Kominfo, pelatihan keterampilan oleh Disnaker, perlindungan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta regulasi dari pemerintah daerah. Saat ini, kurangnya koordinasi lintas sektor menyebabkan kebijakan yang ada berjalan secara parsial dan belum menyentuh kebutuhan pekerja digital secara menyeluruh.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Penelitian ini telah melakukan kajian kritis terhadap literatur yang membahas dampak ekonomi gig dan kerja jarak jauh, serta bagaimana relevansi model kerja digital tersebut dalam konteks Kota Jayapura. Hasil analisis menunjukkan bahwa model kerja digital ini memiliki potensi besar dalam memperluas akses kerja dan memberikan fleksibilitas, terutama di wilayah seperti Jayapura yang memiliki keterbatasan pasar kerja formal. Namun, ada sejumlah tantangan struktural dan kebijakan yang harus diatasi agar manfaat tersebut bisa dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa ekonomi gig dan kerja jarak jauh dapat menjadi alternatif penting bagi masyarakat Jayapura, terutama mereka yang sulit memperoleh pekerjaan formal. Meski demikian, para pekerja di sektor ini menghadapi berbagai risiko, seperti pendapatan yang tidak pasti, kurangnya perlindungan sosial, dan jam kerja yang tidak stabil. Di

samping itu, tantangan struktural yang ada meliputi ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital, serta terbatasnya akses pelatihan keterampilan digital. Kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini juga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik pekerja gig dan kerja jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi antar sektor untuk mengoptimalkan manfaat dari model kerja digital tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Jayapura dan para pemangku kepentingan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan infrastruktur digital yang merata harus menjadi prioritas, termasuk memperluas akses internet di distrik-distrik yang masih tertinggal. Kedua, peningkatan literasi dan keterampilan digital melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi gig dan kerja jarak jauh perlu digalakkan, dengan melibatkan komunitas lokal, universitas, dan pelaku platform digital. Ketiga, regulasi perlindungan sosial bagi pekerja digital harus dirumuskan secara khusus di tingkat daerah, mencakup aspek seperti jam kerja, upah, dan jaminan sosial. Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi digital melalui pembentukan pusat inovasi, insentif untuk UMKM digital, dan akses pembiayaan juga sangat penting. Terakhir, koordinasi yang efektif antar berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus dibangun untuk menciptakan ekosistem kerja digital yang inklusif.

Untuk mendukung pengembangan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini juga menyarankan agar studi lanjutan dilakukan. Penelitian kuantitatif yang menggunakan survei

pada pekerja gig dan kerja jarak jauh di Jayapura sangat dibutuhkan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial secara lebih tepat. Selain itu, studi kualitatif dapat memberikan wawasan tentang pengalaman, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Analisis perbandingan dengan daerah lain di Indonesia juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam kebijakan ketenagakerjaan digital. Tak kalah penting adalah penelitian longitudinal yang dapat memantau perkembangan pasar kerja digital dan efektivitas intervensi kebijakan dari waktu ke waktu. Dengan adanya penelitian lanjutan yang menyeluruh, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam mendukung kesejahteraan pekerja di era ekonomi digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Autor, D., Mindell, D., & Reynolds, E. (2020). *The work of the future: Building better jobs in an age of intelligent machines*. MIT Work of the Future Initiative.
- Bappenas. (2021). *Transformasi ekonomi digital Indonesia*. Jakarta.
- Baruch, Y. (2000). Teleworking: Benefits and pitfalls as perceived by professionals and managers. *New Technology, Work and Employment*, 15(1), 34–49.
- Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165–218.
- BPS. (2024). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2024*.
- BPS Papua. (2024). *Papua dalam angka 2024*.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work,*

*progress, and prosperity in a time of brilliant technologies.* W. W. Norton & Company.

- De Stefano, V. (2016). *The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowd work and labour protection in the “gig-economy”* (ILO Conditions of Work and Employment Series No. 71). International Labour Organization.
- Friedman, G. (2014). Workers without employers: Shadow corporations and the rise of the gig economy. *Review of Keynesian Economics*, 2(2), 171–188.
- ILO. (2021). *Working from home: From invisibility to decent work*. International Labour Organization.
- Katz, L. F., & Krueger, A. B. (2019). The rise and nature of alternative work arrangements in the United States, 1995–2015. *ILR Review*, 72(2), 382–416.
- Kominfo. (2022). *Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Papua*.
- Rahmatutik, R., & Laksmono, B. S. (2023). Active labour market policy in Indonesia: Reviewing the employment policies and programmes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 65–82.
- Setyowati, D. (2021). Digital platform and precarious work in Indonesia: The case of online drivers. *Journal of Industrial Relations*, 63(3), 457–475.
- Tambunan, T. (2022). Digitalisasi ekonomi dan peluang UMKM di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 22(1), 23–38.
- Yudhistira, M. H., & Nasution, M. E. (2021). Gig economy dan perlindungan sosial di Indonesia. *CSIS Commentary Series*, 2021(5), 1–6.